

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Rabu, 27 Maret 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

| No | Media | Tanggal | News Title | Resume |
|----|---------------------------------|------------------------|---|---|
| 1 | Koran Tempo (halaman 23) | Rabu, 27 Maret 2019 | Program Rendah Karbon Prioritas Pembangunan | Pemerintah memprioritaskan pembangunan rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan penyusunan rencana tersebut untuk mendorong pembangunan yang menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, social, dan lingkungan. "Sudah sejalan dengan SDGs (sustainable development goals) yang telah jadi komitmen global, terutama sampai 2030," ujarnya, kemarin. |
| 2 | Kompas (halaman Utama) | Rabu, 27 Maret 2019 | Pembangunan Ekonomi dengan Paradigma Baru | Pembangunan rendah karbon penting ditetapkan demi menjamin pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi kesepakatan global. Tanpa mengubah paradigma pembangunan yang dianut selama ini, risiko terjadinya bencana akan semakin tinggi sehingga bias menghambat pertumbuhan ekonomi. |
| 3 | Kompas (halaman 9) | Rabu, 27 Maret 2019 | Kelola Danau Masuk Agenda Pembangunan | Pengelolaan danau di Indonesia menerapkan strategis baru dengan menjadi bagian rencana pembangunan jangka menengah dan rencana tata ruang di pusat dan daerah. Itu bertujuan agar penyelamatan danau terintegrasi, menyeluruh, dan melibatkan pemangku kepentingan. Pada tahap awal langkah itu dijalankan di Danau Rawa Pening, 1 dari 15 danau prioritas nasional yang ditetapkan sejak sepuluh tahun lalu. Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 22 Maret 2019. |
| 4 | Kompas (halaman 21) | Rabu, 27 Maret 2019 | Pemanfaatan Lahan Baru Masih Tunggu Legalitas | Lahan baru yang tercipta dari pembangunan tanggul pengaman pantai di Jakarta Utara berpotensi dimanfaatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pemanfaatan belum berjalan karena legalitas tanah masih diproses. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah membuat tanggul dengan total Panjang 4,5 kilometer di Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, dan di Kalibaru, Kecamatan Cilincing. Tanggul ini bagian dari proyek Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD). |
| 5 | Media Indonesia (halaman 17) | Rabu, 27 Maret 2019 | Penyelamatan 15 Danau Prioritas Disinergikan | Upaya penyelamatan 15 danau prioritas membutuhkan sinergi dan aksi konkret dari sejumlah pihak. Karena itulah, 11 menteri menyepakati sejumlah bulir kesepakatan untuk dapat menyelamatkan keberadaan danau-danau prioritas tersebut di Jakarta, kemarin. Penandatanganan kesepakatan dilakukan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Delapan Menteri lain diwakili pejabat terkait. |
| 6 | Bisnis Indonesia (halaman 7) | Rabu, 27 Maret 2019 | Tuntaskan Dana Talangan Lahan | Singkat cerita, pada 16 Desember 2015, Kementerian Keuangan membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merupakan Badan dan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain menjadi pengelola asset negara, LMAN juga melakukan perencanaan pendanaan dan pendayagunaan lahan, serta pembayaran ganti rugi pengadaan tanah oleh badan usaha. |
| 7 | Bisnis Indonesia (halaman 7) | Rabu, 27 Maret 2019 | Pembahasan Alot, Diskon Diperpanjang | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperpanjang diskon tarif jalan tol di koridor Trans-Jawa karena pembahasan integrasi tarif antaroperator belum menentu. Masa pembangunan dan pengoperasian jalan tol yang beragam menjadi salah satu penyebab perumusan tarif menjadi alot. |

| | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 8 | Bisnis Indonesia (halaman 8) | Rabu, 27 Maret 2019 | Jateng Berupaya Tekan Permukiman | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk menghapus seluruh Kawasan permukiman kumuh pada 2024 mendatang. Dalam 5 tahun terakhir sudah menunjukkan penurunan yang signifikan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Budi Wibowo mengatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 2014 jumlah permukiman kumuh luasnya mencapai 3.982 hektare. |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|

| | | | |
|--------|---|---------|---------------------|
| Judul | Program Rendah Karbon Prioritas Pembangunan | Tanggal | Rabu, 27 Maret 2019 |
| Media | Koran Tempo (halaman 23) | | |
| Resume | Pemerintah memprioritaskan pembangunan rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan penyusunan rencana tersebut untuk mendorong pembangunan yang menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, social, dan lingkungan. "Sudah sejalan dengan SDGs (sustainable development goals) yang telah jadi komitmen global, terutama sampai 2030," ujarnya, kemarin. | | |

Program Rendah Karbon Prioritas Pembangunan

Potensi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai rata-rata 6 persen.



Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kiri) dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menandatangani kerja sama pembangunan rendah karbon di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Februari lalu.

Larissa Huda

larissa.huda@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah memprioritaskan pembangunan rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan penyusunan rencana tersebut untuk mendorong pembangunan yang menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. "Sudah sejalan dengan SDGs (*sustainable development goals*) yang telah jadi komitmen global, terutama sampai 2030," ujarnya, kemarin.

Bambang menuturkannya penyusunan kerangka teknokratiknya sedang dalam tahap finalisasi. Menurut dia, pencemaran lingkungan yang tidak diatasi justru menjadi penyebab pelambatan per-

tumbuhan ekonomi. Karena itu, harus ada upaya atau intervensi agar emisi karbon di Indonesia menurun sehingga pertumbuhan ekonomi bisa naik. "Kami balik, bukan pertumbuhan ekonomi sebabkan emisi, melainkan kami turunkan emisi, pertumbuhan ekonomi akan bertumbuh atau lebih tinggi," kata dia.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudiyanto, mengatakan kerangka tersebut disusun agar pembangunan ekonomi lebih berkelanjutan. Selama ini, kata dia, kontribusi utama pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada lingkungan. Begitu sebaliknya," ucapnya.

Sepanjang 1960-1980, Bappenas mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 7,3 persen secara tahunan. Adapun kontribusi utamanya adalah minyak mentah, yang dike-

nal dengan masa keemasan *oil boom*. Memasuki 1980-1996, pertumbuhan mulai menyusut dengan mengandalkan kontribusi komoditas non-minyak dan gas.

Bahkan pada 1997 krisis ekonomi sehingga pertumbuhan minus 13 persen. Mulai 1998-2017, pertumbuhan ekonomi terjadi rata-rata 5,3 persen masih bisa dinikmati.

Arifin menuturkannya eksploitasi sumber daya alam sangat kontradiktif terhadap daya dukung dan tampung lingkungan. Pembangunan ekonomi rendah karbon, ia melanjutkan, akan mendorong kembali pertumbuhan ekonomi. "Kalau masih menggunakan pola pembangunan ekonomi yang saat ini hanya menggunakan sumber daya alam, perhitungan kami, pertumbuhan ekonomi akan berkurang jadi 4,3 persen," tuturnya.

Berdasarkan laporan kajian, pembangunan rendah karbon bisa menghasilkan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 6

persen hingga 2045 tanpa melampaui daya dukung lingkungan. Adapun pada 2030 target pengurangan emisi sebesar 43 persen. Proyeksinya, kata Arifin, pada 2045 kemiskinan ekstrem bisa berkurang dari 9,8 persen menjadi 4,2 persen. Selain itu, setidaknya akan ada 15,3 juta pekerjaan tambahan yang ramah lingkungan dan mencegah 40 ribu kematian akibat polusi setiap tahun, juga mencegah hilangnya 16 juta hektare kawasan hutan.

"Untuk itu, kami menginisiasi pembangunan rendah karbon sebagai paradigma baru dalam pembangunan ke depan," ujar Arifin.

Komisiner Low Carbon Development Initiative, Boediono, mengatakan pembangunan rendah karbon tidak bisa dipisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Kemauan dan komitmen pemerintah sangat diperlukan meski sistem politik dengan adanya siklus lima tahunan tidak bisa dihindari.

Menuju Ekonomi Hijau

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memasang target integrasi penanggulangan perubahan iklim dalam agenda pembangunan nasional. Inisiatif pembangunan rendah karbon mengacu pada laporan studi yang melibatkan kementerian/lembaga, mitra pembangunan tingkat nasional dan global, serta masyarakat sipil. Berikut ini skenario menekan karbon.

43 persen

Pengurangan emisi gas rumah kaca pada 2030.

6 persen

Rata-rata pertumbuhan PDB per tahun pada 2019-2045.

US\$ 5,4 triliun

Tambahan PDB pada 2045.

40 ribu

Mengurangi angka kematian setiap tahun.

4,2 persen

Tingkat kemiskinan ekstrem dari total penduduk 2045. Sebelumnya, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 9,3 persen dari total penduduk.

15,3 juta

Lapangan pekerjaan baru pada 2045 yang lebih hijau dan memberi upah lebih baik.

16 juta hektare

Pencegahan hilangnya lahan hutan pada 2045.

Strategi Kebijakan Menekan Polusi

► Mempercepat transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara.

Khususnya meningkatkan bauran energi terbarukan dari sekitar 8 persen pada 2015 menjadi 23 persen pada 2030 serta 30 persen pada 2045.

► Peningkatan efisiensi energi disertai dengan transisi ke EBT.

Secara khusus, intensitas energi (rasio permintaan energi dengan PDB) diturunkan menjadi rata-rata 3,5 persen per tahun hingga 2045.

► Penegakan penuh moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut.

Hutan primer, lahan gambut, dan mangrove dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendukung keanekaragaman hayati, dan menyerap emisi karbon.

► Meningkatkan komitmen deforestasi menjadi tiga kali lipat.

Mencapai lebih dari 1 juta hektare per tahun pada 2024.

► Mematuhi target komitmen terkait dengan sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati.

Mengacu pada Target Aichi, Protokol Nagoya, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2015-2020.

► Peningkatan produktivitas lahan sebesar 4 persen per tahun.

Sehingga total nilai tambah per unit lahan menjadi 2,3 kali dari semula pada 2018-2045, sekaligus mengurangi intensitas lahan per kapita sebesar 1,6 persen selama periode tersebut.

• SUMBER: BAPPENAS

Menurut dia, banyak masalah pembangunan mendasar yang hanya dipecahkan dengan strategi jangka panjang.

Boediono menuturkannya nantinya kemajuan pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan PDB, tapi juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial. Keberhasilan pembangu-

an rendah karbon sangat bergantung pada keterlibatan dan partisipasi penuh pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

"Perlu ada investasi pembuatan keputusan dan kebijakan jangka panjang untuk mendukung program rendah karbon," ujar wakil presiden periode 2009-2014 itu.

| | | | |
|--------|---|---------|---------------------|
| Judul | Pembangunan Ekonomi dengan Paradigma Baru | Tanggal | Rabu, 27 Maret 2019 |
| Media | Kompas (halaman Utama) | | |
| Resume | Pembangunan rendah karbon penting ditetapkan demi menjamin pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi kesepakatan global. Tanpa mengubah paradigma pembangunan yang dianut selama ini, risiko terjadinya bencana akan semakin tinggi sehingga bias menghambat pertumbuhan ekonomi. | | |

LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan Ekonomi dengan Paradigma Baru

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan rendah karbon penting diterapkan demi menjamin pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi kesepakatan global. Tanpa mengubah paradigma pembangunan yang dianut selama ini, risiko terjadinya bencana akan semakin tinggi sehingga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam peluncuran hasil kajian Pembangunan Rendah Karbon (PRK)

di Jakarta, Selasa (26/3/2019), menegaskan, "LCDI (inisiatif pembangunan rendah karbon) akan kami arus utamakan menjadi bagian penting tidak terpisahkan dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024."

Dalam kajian PRK tersebut dimasukkan kesetimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. "Karena aspek lingkungan akan dijadikan dasar menjamin keberlangsungan, dan ini sudah *inline* (sejalan) dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah menjadi komitmen global sampai

(Bersambung ke hlm 11 kol 3-5)

Pembangunan Ekonomi dengan

(Sambungan dari halaman 1)

2030," kata Bambang.

Prinsip PRK merupakan titik temu atau penengah dari dua mazhab ekonomi, yaitu mazhab yang menekankan pada eksploitasi sumber daya alam tanpa memedulikan lingkungan, dengan mazhab yang mengutamakan perlindungan lingkungan sehingga dipandang menjadi penghalang pembangunan ekonomi.

Menurut Bambang, PRK bisa menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak mengorbankan yang lainnya, yaitu aspek lingkungan dan sosial. "Kita tetap harus menjaga pertumbuhan ekonomi ini bukan hanya untuk satu generasi, melainkan untuk generasi berikutnya alias harus berkelanjutan," ujarnya.

Wakil Presiden 2009-2014 Boediono, dalam sambutannya, mengatakan, pembangunan ekonomi saat ini tidak boleh memasung generasi masa mendatang, terutama terkait dengan kontrak investasi yang biasanya jangka panjang.

Untuk memastikan PRK akan diarusutamakan dalam RPJMN 2020-2024 di bawah presiden terpilih, Bambang mengatakan, "Kami sudah memberikan paparan tentang PRK di hadapan Komisi Pe-

Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca



Asumsi Dasar: Tidak ada kebijakan baru, tetapi memperhitungkan degradasi lingkungan.

PRK-Menengah: Meliputi kebijakan rendah karbon baru untuk tahun 2020-2045; mencapai target NDC tanpa syarat.

PRK-Tinggi: Meliputi kebijakan yang lebih ambisius daripada PRK-Menengah untuk tahun 2020-2045; mencapai target NDC bersyarat.

PRK-Plus: Mencerminkan PRK-Tinggi untuk 2020-2024, dan kebijakan tambahan yang lebih ambisius.

PRK: Pembangunan rendah karbon
NDC: Kontribusi penurunan emisi karbon nasional
Sumber: Direktorat Lingkungan Hidup-Bappenas

INFOGRAFIK: ARJENDRO

milihan Umum dan tim sukses dari kedua calon presiden," ujarnya. Proses selanjutnya adalah negosiasi antara Bappenas dan tim sukses presiden terpilih serta kementerian/lembaga terkait.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Ruidiyanto mengatakan, dalam mengimplementasikan PRK ada lima kebijakan utama yang didorong. Kebijakan itu, yakni terkait energi baru dan terbarukan, perlindungan hutan dan restorasi gambut, pengelolaan sampah industri dan sampah rumah tangga, peningkatan produktivitas pertanian,

serta perbaikan kelembagaan dan tata kelola.

Kebijakan tentang energi terbarukan, menurut Bambang, "Tampaknya belum menjadi urgensi bagi sementara pelaku dan yang berwenang." Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah *political will* dan sebaiknya segera dipelajari skema terbaik dari energi terbarukan.

Pakar ekonomi dari London School of Economics, Nicholas Stern, menggarisbawahi, untuk bergeser pada kebijakan PRK, harus ada kebijakan finansial untuk membantu orang yang saat ini bekerja di aktivitas emisi karbon tinggi. (ISW)

| | | | |
|--------|--|---------|---------------------|
| Judul | Kelola Danau Masuk Agenda Pembangunan | Tanggal | Rabu, 27 Maret 2019 |
| Media | Kompas (halaman 9) | | |
| Resume | Pengelolaan danau di Indonesia menerapkan strategis baru dengan menjadi bagian rencana pembangunan jangka menengah dan rencana tata ruang di pusat dan daerah. Itu bertujuan agar penyelamatan danau terintegrasi, menyeluruh, dan melibatkan pemangku kepentingan. Pada tahap awal langkah itu dijalankan di Danau Rawa Pening, 1 dari 15 danau prioritas nasional yang ditetapkan sejak sepuluh tahun lalu. Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 22 Maret 2019. | | |

Kelola Danau Masuk Agenda Pembangunan

Pemerintah menerapkan strategi baru pengelolaan sejumlah danau dengan memasukkannya ke dalam rencana pembangunan.

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan danau di Indonesia menerapkan strategi baru dengan menjadi bagian rencana pembangunan jangka menengah dan rencana tata ruang di pusat dan daerah. Itu bertujuan agar penyelamatan danau terintegrasi, menyeluruh, dan melibatkan pemangku kepentingan.

Pada tahap awal langkah itu dijalankan di Danau Rawa Pening, 1 dari 15 danau prioritas nasional yang ditetapkan sejak sepuluh tahun lalu. Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 22 Maret 2019.

"Contoh konkret implementasi dimulai dengan Jateng. Dalam sepuluh tahun dihasilkan rencana pengelolaan danau terpadu dan disahkan Gubernur

Jateng," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Selasa (26/3/2019), sesuai Rapat Koordinasi Nasional Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau di Jakarta.

Kegiatan itu menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, serta sejumlah gubernur/wakil gubernur dan bupati. BNPB baru dilibatkan menyelamatkan danau demi edukasi publik soal risiko bencana.

Rencana pengelolaan Danau Rawa Pening akan disusul da-

nau prioritas lain. Itu diharapkan menyelamatkan danau sebagai cadangan air, sumber perikanan, pariwisata, transportasi, habitat flora dan fauna, serta identitas budaya lokal.

Belum efektif

Selama ini penyelamatan ekosistem danau belum efektif karena parsial, sporadis, dan sektoral oleh pemerintah pusat dan daerah, komunitas, serta pelaku usaha. "Ada hal penting diperkuat terkait kesepahaman urgensi, kesamaan visi, dan sinergi program," ujarnya.

Bambang berpesan agar tiap sektor menanggalkan ego demi kepentingan publik. Proyeksi ketersediaan air pada 2045 menunjukkan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan krisis air. Ironisnya, itu saat Indonesia

dicita-citakan jadi negara maju di 100 tahun kemerdekaannya.

Basuki menyebut Danau Rawa Pening sebagai satu dari 10 danau tersentuh kementerian. Kini hanya Danau Sentani yang belum selesai penyusunan rencana pengelolaan danau. Rencana pengelolaan 14 danau prioritas lain, seperti Toba, Maninjau, Singkarak, Kerinci, Batur, Tempe, Tondano, dan Limboto, telah selesai.

Dalam acara itu dilaksanakan penandatanganan kesepakatan II menteri terkait penyelamatan danau prioritas nasional. Kesepakatan berisi antara lain kerja sama mewujudkan danau prioritas nasional sehat dan lestari. Kepala daerah pemangku wilayah 15 danau prioritas nasional menandatangani dokumen serupa. (ICH)

| | | | |
|--------|--|---------|---------------------|
| Judul | Pemanfaatan Lahan Baru Masih Tunggu Legalitas | Tanggal | Rabu, 27 Maret 2019 |
| Media | Kompas (halaman 21) | | |
| Resume | Lahan baru yang tercipta dari pembangunan tanggul pengaman pantai di Jakarta Utara berpotensi dimanfaatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pemanfaatan belum berjalan karena legalitas tanah masih diproses. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah membuat tanggul dengan total Panjang 4,5 kilometer di Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, dan di Kalibaru, Kecamatan Cilincing. Tanggul ini bagian dari proyek Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD). | | |

TANGGUL PANTAI

Pemanfaatan Lahan Baru Masih Tunggu Legalitas

JAKARTA, KOMPAS — Lahan baru yang tercipta dari pembangunan tanggul pengaman pantai di Jakarta Utara berpotensi dimanfaatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, pemanfaatan belum berjalan karena legalitas tanah masih diproses.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah membuat tanggul dengan total panjang 4,5 kilometer di Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, dan di Kalibaru, Kecamatan Cilincing. Tanggul ini bagian dari proyek Pembangunan Kawasan Pesisir

Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD).

Menurut Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, pemprov berupaya agar lahan baru di belakang tanggul menjadi aset provinsi. Legalitas lahan sedang diurus Badan Pengelola Aset Daerah DKI.

"Jika legalitas terkait tanah sudah ada, program pemanfaatan di beberapa titik akan dibahas, misalnya untuk pembangunan rumah nelayan, taman interaktif, dan beberapa sarana fasilitas pendukung kegiatan di pesisir," ucap Ali, Selasa (26/3/2019).

Selama pemanfaatan belum dimulai, lahan itu rentan digunakan secara ilegal, misalnya untuk membangun bangunan liar. Ada pula potensi lahan dikuasai kelompok tertentu.

Ali menambahkan, bangunan ilegal sudah berdiri di sejumlah titik. Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau telah meminta para camat dan lurah terkait untuk mendata bangunan ilegal. Camat dan lurah diminta mengimbau warga untuk tidak menambah bangunan ilegal. Namun, belum ada instruksi dari Pemprov DKI Jakarta terkait penanganan bangunan

ilegal yang ada.

Di sisi lain, Pemkot Jakarta Utara mempersilakan warga menggunakan lahan baru untuk kegiatan publik, antara lain untuk olahraga dan tempat bermain anak-anak. Lurah diminta mengawasi penggunaan lahan.

Lurah Kalibaru Suyono menyampaikan, di wilayahnya terdapat bangunan liar berupa bedeng-bedeng di balik tanggul, berlokasi di RW 013 dan 001. Namun, bedeng-bedeng ini sudah ada sejak sebelum adanya tanggul dan merupakan tempat usaha pengupasan kerang.

"Ini perlu adanya penataan

mengingat usaha ini menyerap banyak tenaga kerja," ujarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan NCICD Kementerian PUPR, Ferdinanto, mengingatkan, rencana pemanfaatan apa pun terhadap lahan baru yang dipicu proyek NCICD tidak boleh mengganggu struktur dan fungsi tanggul. Karena itu, rencana pemanfaatan mesti disertai kajian teknis.

Kementerian PUPR masih meneruskan pengerjaan di Kalibaru. Tanggul pengaman pantai semestinya sepanjang 3,7 kilometer sehingga saat ini kurang 1,5 kilometer lagi. (JOG)

| | | | |
|--------|---|---------|---------------------|
| Judul | Penyelamatan 15 Danau Prioritas Disinergikan | Tanggal | Rabu, 27 Maret 2019 |
| Media | Media Indonesia (halaman 17) | | |
| Resume | Upaya penyelamatan 15 danau prioritas membutuhkan sinergi dan aksi konkret dari sejumlah pihak. Karena itulah, 11 menteri menyepakati sejumlah bulir kesepakatan untuk dapat menyelamatkan keberadaan danau-danau prioritas tersebut di Jakarta, kemarin. Penandatanganan kesepakatan dilakukan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Delapan Menteri lain diwakili pejabat terkait. | | |

Penyelamatan 15 Danau Prioritas Disinergikan

Melalui kesepakatan bersama 11 menteri, diharapkan upaya penyelamatan danau bisa menghasilkan perubahan konkret.

DHIKA KUSUMA WINATA
dhika@mediaindonesia.com

UPAYA penyelamatan 15 danau prioritas membutuhkan sinergi dan aksi konkret dari sejumlah pihak. Karena itulah, 11 menteri menyepakati sejumlah butir kesepakatan untuk dapat menyelamatkan keberadaan danau-danau prioritas tersebut di Jakarta, kemarin.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Delapan menteri lain diwakili pejabat terkait.

Sebelas kementerian diharapkan meningkatkan kerja sama

serta memasukkan rencana pengelolaan danau terpadu dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana tata ruang. Kesepakatan ini menindaklanjuti Konferensi Danau Nasional I pada 2009 di Bali.

"Sebelum ini telah banyak upaya untuk penyelamatan danau. Namun, hasil yang diharapkan masih belum tercapai karena pelaksanaannya parsial, sporadis, dan sektoral," kata Menteri Siti dalam Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, kemarin.

Akibatnya, sambung Siti, 15 danau prioritas terus mengalami kerusakan. Kuatnya ego sektoral ditemukan di lingkup pemerintah, komunitas, dan dunia usaha

Menurut Menteri Siti, kondisi 15 danau prioritas itu hingga kini status ekosistemnya masih terancam. Fungsinya sebagai sumber air bersih, penghasil ikan, dan habitat fauna tidak lagi optimal. Itu karena terjadi peningkatan sedimentasi dan penurunan kualitas air. "Pemanfaatan danau dan daerah tangkapan air kurang memperhatikan lingkungan," imbuah Siti.

Adapun 15 danau prioritas tersebut ialah Danau Rawapening (Jateng), Rawa Danau (Banten), Danau Batur (Bali), Danau Toba (Sumut), Danau Kerinci (Jambi), Danau Maninjau, Danau Singkarak (Sumbar), Danau Poso (Sulteng), Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang, Danau Tondano (Sulut), Danau Tempe dan Danau Matano (Sulsel), Danau Limboto (Gorontalo), Danau Sentarum (Kalbar), Danau Jempang (Kaltim), dan Danau Sentani (Papua).

Krisis air

Bappenas sudah memasukkan revitalisasi 15 danau prioritas ke dalam RPJMN 2020-2024. Pasalnya, aksi penyela-

matan danau sangat strategis.

"Diperkirakan pada 2045 kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap danau-danau, kawasan Jawa dan Nusa Tenggara akan krisis air," ucap Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Ia pun meminta agar Rencana Pengelolaan (RP) Danau bisa diterapkan institusi terkait dan pmda. "Lebih diseriusi," timpalnya lagi.

Selain 11 kementerian, kesepakatan itu juga melibatkan sejumlah kepala daerah yang secara administratif menaungi 15 danau prioritas nasional. Mereka menyepakati upaya penyelamatan berdasarkan RP Danau prioritas nasional.

Sejumlah kepala daerah tersebut ialah Gubernur Sumatra Utara, Gubernur Sumatra Barat, Gubernur Jambi, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Gorontalo, Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Agam, Bupati Bangli, Bupati Kapuas Hulu, Bupati Luwu Timur, Bupati Minahasa, dan Gubernur Papua. (H-3)

| | | | |
|--------|--|---------|---------------------|
| Judul | Tuntaskan Dana Talangan Lahan | Tanggal | Rabu, 27 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 7) | | |
| Resume | Singkat cerita, pada 16 Desember 2015, Kementerian Keuangan membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merupakan Badan dan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selain menjadi pengelola asset negara, LMAN juga melakukan perencanaan pendanaan dan pendayagunaan lahan, serta pembayaran ganti rugi pengadaan tanah oleh badan usaha. | | |

► PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Tuntaskan Dana Talangan Lahan

Keterbatasan dana dalam pengadaan tanah bagi proyek infrastruktur, khususnya proyek strategis nasional, pemerintah mau tidak mau akhirnya melibatkan badan usaha pemilik proyek untuk keperluan tersebut.

Krizia P. Kinanti & Zufrizal
redaksi@bisnis.com

Singkat cerita, pada 16 Desember 2015, Kementerian Keuangan membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Selain menjadi pengelola aset negara, LMAN juga melakukan perencanaan pendanaan dan pendayagunaan lahan, serta pembayaran ganti rugi pengadaan tanah oleh badan usaha.

Dalam perjalanannya, banyak badan usaha terutama pemegang konsesi proyek jalan tol dan kontraktor proyek bendungan, termasuk perkeretaapian, dan pelabuhan yang antusias mengalokasikan dana talangan untuk pembebasan lahan proyek yang mereka kerjakan.

Mereka berharap supaya dengan pembebasan lahan yang lancar, pemenuhan pembiayaan proyek yang mengandalkan pinjaman dari lembaga keuangan segera tuntas.

► **Sebenarnya pengembalian dana talangan dapat dipercepat, tetapi semua bergantung kepada LMAN.**

rah, tetap bergerak.

Akan tetapi, pengembalian dana talangan kepada badan usaha oleh LMAN ternyata tidak secepat dan semudah yang mereka harapkan. Berkali-kali, badan usaha maupun ATI meminta percepatan pengembalian dari LMAN. Mereka tetap harus bersabar.

BERBEDA PANDANGAN

Walaupun dikembalikan, dibutuhkan waktu yang cukup lama karena adanya perbedaan pandangan tata cara pengembalian antara badan usaha dan LMAN.

Beberapa waktu yang lalu, misalnya, Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiaкто mengatakan bahwa nilai dana talangan miliknya yang belum dikembalikan LMAN adalah senilai Rp1,60 triliun.

Seharusnya, kata Herwi, dana itu bisa dibayarkan dengan cepat karena semuanya sudah mengikuti alur untuk

Menurut Endra, sebenarnya proses ini dapat dipercepat lagi, tetapi semua bergantung kepada LMAN. "Sebetulnya kalau sudah di BPN kan [soal] kelengkapan, kalau di BPKP itu kelaikan bayarnya, baru dilimpahkan ke LMAN. Sebetulnya bisa lebih cepat kalau memang sudah di-approve, tidak bisa di-review lagi, tetapi itu kembali lagi ke LMAN."

Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara verifikasi yang dilakukan BPKP dan juga LMAN.

"BPKP fungsinya pengawasan, LMAN kuasa pemilik anggaran yang menurut ketentuan wajib meneliti kelengkapan dokumen," ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Berdasarkan data LMAN, per 1 Maret 2019, lembaga itu telah melakukan pembayaran proyek strategis nasional (PSN) jalan tol sebesar Rp32,21 triliun yang berasal dari tiga alokasi tahun anggaran yakni tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018.

Untuk PSN jalan tol tahun anggaran 2016, realisasi pengembaliannya adalah Rp13,60 triliun, 2017 sebesar Rp18,14 triliun, dan 2018 sebanyak Rp0,47 triliun.

Apabila diperinci, pembayaran pada tahun anggaran 2016 sebanyak Rp13,60 triliun berasal dari tagihan Rp13,90 triliun, untuk tahun anggaran 2017 yang telah dibayarkan Rp18,14 triliun berasal dari tagihan Rp25,26 triliun, dan

Untuk memenuhi kebutuhan akan dana talangan pembebasan lahan, hampir semua badan usaha menggunakan pinjaman dari lembaga keuangan, di samping menggunakan dari kas perusahaan. Meskipun dikenakan bunga pinjaman, hal itu tidak menyurutkan minat badan usaha untuk mempercepat proses pengadaan lahan.

Apalagi, mereka bakal memperoleh insentif berupa bunga dari LMAN atas dana yang sudah dikeluarkan.

Kendati berulang kali Asosiasi Tol Indonesia meminta agar insentif tersebut disamakan dengan bunga pinjaman badan usaha kepada lembaga keuangan, pemerintah bergeming.

Lagi-lagi, penolakan dari pemerintah tersebut tak menyurutkan langkah badan usaha membangun proyek mereka. Hasilnya, sejumlah proyek bendungan selesai dibangun dan jalan tol Trans-Jawa tersambung hampir sepanjang 1.000 kilometer. Begitu pula dengan proyek-proyek di dae-

audit dana talangan, tetapi hingga awal bulan ini belum juga dibayarkan oleh LMAN.

"Ini jadi tidak *balance* harusnya kan kalau sudah dianggarkan di pemerintahan sudah melalui verifikasi BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan]. Kami tidak melanggar aturan *mbok* ya, setelah audit lolos cepat-cepat dibayar, ini masih masuk LMAN," katanya ketika berkunjung ke redaksi *Bisnis Indonesia*, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa lamanya proses penggantian dana tersebut dikarenakan asas kehati-hatian dari pemerintah.

"Ya, itu kan karena kehati-hatian karena ini kan masalah tanah, masalah yang sensitif. Jadi, dia [proses] kan ada beberapa tahapan ada dari BPN [Badan Pertanahan Nasional] kemudian BPKP, baru masuk ke LMAN. Ya, itu memang begitu alurnya," ujarnya.

tahun anggaran 2018 telah dibayarkan Rp0,47 triliun dari tagihan Rp0,59 triliun.

Adapun, sisanya masih terdapat dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol serta permasalahan tanah karakteristik khusus seperti tanah kas desa dan tanah Perum Perhutani.

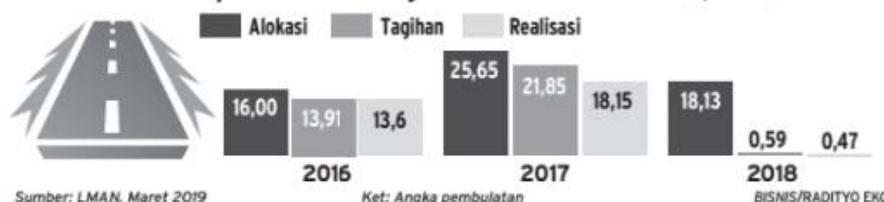
Jika LMAN berpedoman pada ketentuan yang mengikatnya, tentu tidak ada alasan untuk menyudutkan lembaga tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, badan usaha membutuhkan pengembalian yang cepat agar bisa segera melunasi kewajibannya kepada lembaga keuangan serta untuk keperluan lain.

Ke depan, mungkin pemerintah perlu mencari cara yang lebih simpel tidak berbelit-belit dan menjamin pengembalian dana talangan tepat waktu agar badan usaha tetap antusias membangun infrastruktur walaupun badan usaha itu berupa BUMN atau anak dan cucu usahanya. ■

Perlahan-lahan Pembayaran Akan Dituntaskan

Pembebasan lahan menjadi menjadi isu sentral dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Setelah masalah pembebasan lahan terselesaikan dengan terbitnya UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada 2012 beserta aturan turunannya, kemudian muncul permasalahan baru. Dana pemerintah tidak mencukupi untuk membayar pengadaan lahan sehingga swasta dilibatkan dengan menyediakan dana talangan. Namun, dalam perjalanannya pembayaran kembali dana talangan sedikit bermasalah meskipun perlahan-lahan terselesaikan. Namun, belum sepenuhnya terbayarkan.

Perincian Pembayaran Dana Talangan Jalan Tol oleh LMAN (Rp triliun)



Pengadaan Lahan Proyek Bendungan Tahun Anggaran 2017 (Rp triliun)



Alokasi:
2,78

Tagihan:
2,03

Realisasi:
1,99

Bidang lahan terbayar:
6.758

Pengadaan Lahan Proyek Kereta Api Tahun Anggaran 2017 (Rp triliun)



Alokasi:
3,51

Tagihan:
0,69

Realisasi:
0,56

Bidang lahan terbayar:
764

Pengadaan Lahan Proyek Pelabuhan Tahun Anggaran 2017 (Rp triliun)



Alokasi:
0,50

Tagihan:
0,21

Realisasi:
0,20

Bidang lahan terbayar:
241

| | | | |
|--------|---|---------|---------------------|
| Judul | Pembahasan Alot, Diskon Diperpanjang | Tanggal | Rabu, 27 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 7) | | |
| Resume | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperpanjang diskon tarif jalan tol di koridor Trans-Jawa karena pembahasan integrasi tarif antaroperator belum menentu. Masa pembangunan dan pengoperasian jalan tol yang beragam menjadi salah satu penyebab perumusan tarif menjadi alot. | | |

► TARIF INTEGRASI TRANS-JAWA

Pembahasan Alot, Diskon Diperpanjang

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat memperpanjang diskon tarif jalan tol di koridor Trans-Jawa karena pembahasan integrasi tarif antaroperator belum menentu.

Masa pembangunan dan pengoperasian jalan tol yang beragam menjadi salah satu penyebab perumusan tarif menjadi alot.

Menteri PUPR Basuk Hadimuljono mengatakan bahwa perpanjangan diskon tarif berlaku hingga 2 bulan ke depan atau saat menjelang Idulfitri pada Juni 2019.

Diskon tarif sebesar 15% seharusnya berakhir pada 21 Maret 2019 atau 2 bulan setelah seluruh ruas jalan tol di koridor Trans-Jawa tersambung.

"Sementara diskon [diperpanjang] ya, karena memang [tarif integrasi] belum disepakati. Ini nanti dibicarakan antar-BUJT [badan usaha jalan tol], kalau disatukan tarifnya bagaimana," ujarnya, Selasa (26/3).

Basuki mengakui bahwa perumusan integrasi tarif jalan tol Trans-Jawa yang dikelola oleh operator yang beragam memang tidak mudah. Terlebih, masa pembangunan dan pengoperasian jalan tol juga beragam sehingga struktur biaya yang dikeluarkan di setiap ruas jomplang.

Dia menggambarkan tarif per kilometer jalan tol Jakarta—Cikampek hanya Rp200 per kilometer karena sudah beroperasi sejak 1984.

Sementara itu, tarif per kilometer jalan tol Cikipo—Palimanan mencapai Rp1.000, sedangkan

ruas-ruas tol yang baru beroperasi pada tahun lalu lebih dari Rp1.000.

Sebelumnya, Kementerian PUPR sudah meminta agar operator untuk menyederhanakan tarif di koridor Trans-Jawa. Pasalnya, untuk lintas Jakarta—Surabaya saja, sedikitnya ada 12 ruas yang dikelola oleh tiga entitas pengendali, yakni PT Jasa Marga Tbk., PT Waskita Toll Road, dan Astra Infra.

Skema yang simpel diharapkan membuat tarif tol lebih kompetitif dibandingkan dengan moda angkutan lain.

Untuk itu, sejak 21 Januari 2019, operator membagi koridor Trans-Jawa menjadi empat klaster.

Diskon diberikan untuk pengendara yang melintas penuh di setiap klaster. Walhasil, skema ini membuat tarif akan makin rendah untuk jarak jauh.

Basuki mengungkapkan bahwa opsi menerapkan subsidi silang dalam perumusan tarif jalan tol Trans-Jawa juga mengemuka.

Dalam skema tersebut, tarif ruas-ruas jalan tol yang sudah beroperasi lama akan dinaikkan sebagai kompensasi dari penurunan tarif di ruas-ruas baru yang dinilai mahal.

JAGA PENGEMBALIAN

Di sisi lain, Basuki menyebutkan bahwa penetapan tarif baru di koridor Trans-Jawa diupayakan tetap menjaga tingkat pengembalian investasi BUJT.

"Kita juga jaga IRR [*internal rate of return*] agar pendapatan mereka tidak turun. Dukungan

dari pemerintah [dalam bentuk kompensasi] nanti akan dibicarakan," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Tol Indonesia Kris Ade Sudiyono mengatakan bahwa saat ini para operator masih mempelajari pola dan analisis lalu lintas yang terjadi dalam 2 bulan terakhir sebagai modal untuk merumuskan tarif baru.

"Mudah-mudahan data tersebut bisa dianalisis dengan baik untuk merumuskan kebijakan berikutnya," jelas Kris kepada *Bisnis*.

Sebelumnya, manajemen PT Jasa Marga Tbk. mengatakan bahwa perseroan masih mengkaji penetapan tarif akhir atau *final pricing* untuk ruas tol Trans-Jawa.

Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Aرسال mengungkapkan bahwa perusahaan masih meninjau ulang tarif akhir ruas tol Trans-Jawa. Oleh karena itu, perseroan masih memperpanjang diskon yang diberikan.

"Diskonnya diperpanjang sampai pemberitahuan lebih lanjut, belum memutuskan," ujarnya, Selasa (26/3).

Menurut Donny, kajian saat ini masih dilakukan termasuk terkait dengan volume lalu lintas. Pasalnya, beberapa anak perusahaan jalan tol (APJT) baru beroperasi selama 2 bulan.

"Lalu lintas APJT baru 2 bulan jadi, belum stabil."

Dengan demikian, katanya, perseroan belum dapat memastikan kapan tarif akhir tol Trans-Jawa bakal ditentukan. (*Rivki Maulana*)

| | | | |
|--------|--|---------|---------------------|
| Judul | Jateng Berupaya Tekan Permukiman | Tanggal | Rabu, 27 Maret 2019 |
| Media | Bisnis Indonesia (halaman 8) | | |
| Resume | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk menghapus seluruh Kawasan permukiman kumuh pada 2024 mendatang. Dalam 5 tahun terakhir sudah menunjukkan penurunan yang signifikan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Budi Wibowo mengatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 2014 jumlah permukiman kumuh luasnya mencapai 3.982 hektare. | | |

► KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jateng Berupaya Tekan Permukiman Kumuh

Bisnis, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya untuk menghapus seluruh kawasan permukiman kumuh pada 2024 mendatang. Dalam 5 tahun terakhir sudah menunjukkan penurunan yang signifikan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Budi Wibowo mengatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 2014 jumlah permukiman kumuh luasnya mencapai 3.982 hektare.

Namun setelah seluruh Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah melakukan pengecekan dan pemutakhiran data ternyata luasan kawasan permukiman kumuh di Jateng lebih tinggi, yakni mencapai 6.981 hektare.

"Dari jumlah itu, pemerintah terus melakukan kegiatan penghapusan kawasan permukiman kumuh dengan serius," kata Budi, Senin (25/3).

Pada 2019 ini, kawasan kumuh di Jawa Tengah berkurang dan hanya tinggal menyisakan 3.004 hektare saja. Artinya sejak 2014 sampai sekarang, sudah ada 3.977 hektare kawasan kumuh di Jateng yang berhasil dihilangkan.

Sisa kawasan permukiman kumuh tersebut, lanjut Budi akan dikeroyok bersama-sama untuk penyelesaiannya sesuai target hingga 2024 semua kawasan kumuh di Jawa Tengah sudah hilang.

"Penghapusan kawasan kumuh ini penting karena tidak hanya membuat wajah daerah tertata rapi, juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Jika kawasan permukiman kumuh

maka kesehatan, kesejahteraan dan faktor-faktor sosial lain tidak akan terwujud," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar fokus penghapusan kawasan permukiman kumuh tidak hanya mengedepankan faktor infrastruktur saja tetapi juga menyentuh aspek kultural dan sosial masyarakat.

Pasalnya, kata Ganjar, kawasan permukiman kumuh banyak ditemui permasalahan sosial seperti kemiskinan pengangguran, narkoba dan kriminalitas. Masalah sosial ini harus diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya penghapusan permukiman kumuh.

"Ini harus diperhatikan, jadi jangan hanya mengubah tampilannya saja, namun kultural masyarakat harus juga dirubah," kata dia.

Menurut Ganjar, banyak masalah yang timbul di kawasan permukiman kumuh. Dirinya mengaku sudah beberapa kali mengunjungi sejumlah kawasan kumuh dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya.

"Saya menemukan ada anak kecil sudah mengenal narkoba, ada yang *ngelem*, seks bebas dan lainnya. Maka penataan kawasan permukiman kumuh ini penting selain demi keindahan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Gubernur menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur dari ada tidaknya kawasan kumuh. Karena itu di negara-negara maju, aspek ini benar-benar diperhatikan. (K28)